**PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP
PENYELENGGARAAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

Oleh : Silvi Isnendina

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Junaidi, S.H., M.H.

Alamat : Gang Hidayah, RT.006, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau

Email : ssilviisnendina@gmail.com / Telepon : 082287455432

ABSTRACT

This research is related to the implementation of supervision of the implementation of billboards which is regulated in Article 35 Paragraph 1 of the Dumai City Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Implementation of Billboards which are carried out routinely. In the field there are still many illegal billboards that are posted not in accordance with the established provisions. Therefore, it is necessary to study the first stimulant, the supervision of the Civil Service Police Unit over the implementation of billboards based on the Regional Regulation of the City of Dumai Number 2 of 2021 concerning the Implementation of Billboards, Second, the obstacles for the Civil Service Police Unit in carrying out supervision of the implementation of billboards in the City of Dumai.

This research is a sociological research, because it is based on field research, namely by collecting data from observations, interviews, and literature studies that have something to do with the problems studied assisted by primary, secondary and tertiary data. This study uses qualitative data analysis, produces descriptive data, and concludes with a deductive thinking method.

From the results of the study, it was concluded that, First, the arrangement for holding billboards based on the Dumai City Regional Regulation Number 2 of 2021 has not been maximized, Second, the supervision of the Civil Service Police Unit on the implementation of billboards based on the Kita Dumai Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the implementation of billboards has not run optimally. Third, the inhibiting factors for the Civil Service Police Unit in carrying out supervision of the implementation of billboards in Dumai City are the lack of operational staff, the lack of coordination between law enforcers, the lack of facilities, and the lack of regulations. As for the supporting factors for the Civil Service Police Unit in carrying out supervision of the implementation of billboards, it is supported by the existence of regulations governing the implementation of billboards, good coordination with Satpol PP responses and supported by motivation and commitment from Satpol PP leaders.

Keywords : Arrangement-Supervision of Civil Service Police Unit-Reklame

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan dengan aturan (regulasi).¹ Ini bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,² menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan baik.

Indonesia sebagai negara berkembang giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, baik pusat maupun di daerah. Pembangunan pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya manusia yang menjadi sarana untuk mencapai

keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan.³

Seiring kemajuan jaman juga telah membawa negara Indonesia masuk ke dalam era globalisasi. Banyak bidang telah mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan teknologi yang terjadi adalah bidang komunikasi. Makin maju dan berkembang pola perilaku dalam masyarakat, maka akan semakin kompleks pula aturan hukum yang dibutuhkan.⁴ Hampir seluruh kebutuhan komunikasi saat ini telah didukung oleh teknologi-teknologi yang menunjang sehingga kreatifitas pemanfaatan media komunikasi tersebut jelas terlihat. Seiring dengan hal tersebut media komunikasi digunakan sebagai cara untuk mengenalkan sebuah produk, jasa, atau orang agar dapat dikenal dan dilirik oleh masyarakat secara luas. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya dunia usaha yang mengalami kemajuan, jadi tidak sedikit pula munculnya papan-papan reklame yang tidak asing lagi disekitar masyarakat.⁵

Untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencegah dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame tersebut, maka penyelenggaraan reklame dibutuhkan beberapa izin, seperti kontruksi dan tata letak reklame. Pengawasan keberadaan reklame tidak hanya dilakukan dengan mengutamakan aspek penerimaan saja, namun juga aspek keindahan, ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan

¹ Emilda Firdaus, Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November 2010, Hlm. 80.

² Mexsasai Indra, “Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1, Agustus-Januari 2015, Hlm.45.

³ Angi Risky Pandiangan, “Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Papan Reklame di Kota Pekanbaru”, JOM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, Februari 2014, hlm: 1

⁴ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Pers, Pekanbaru 2012, hlm.3.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019. hlm. 2.

suatu bentuk pengawasan baik dalam bentuk pengendalian, monitoring maupun evaluasi, apakah penyelenggaraan reklame sudah sesuai yang diharapkan atau belum.

Terdapat beberapa masalah terkait penyelenggaraan reklame, dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dikarenakan masih banyaknya reklame yang secara langsung menimbulkan permasalahan yaitu keamanan tempat papan reklame didirikan, keberadaan reklame yang tidak sesuai target yang diharapkan, karena beberapa penyelenggara reklame yang melakukan pemasangan reklame tetapi tidak melapor terlebih dahulu. Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk pengawasan yang efektif karena hal itu akan memberikan kendali dan bantuan untuk mengatasi permasalahan dari penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Keberadaan Papan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame?
3. Apakah hambatan dan faktor pendukung bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame
- b. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Dumai
- c. Untuk mengetahui penghambat maupun faktor-faktor pendukung bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Dumai

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi dan sejauh mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu hukum manajemen, karena pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengolahan. Mengenai pengawasan George R. Terry mengatakan sebagai *“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to ensure result in keeping with the*

plan” (pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan kolektif, jika diperlukan untruk memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). Dari pengertian ini tampak bahwa pengawasan ini dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak diletakkan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang dilakukan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.⁶

Dalam teori hukum bentuk pengawasan itu dibagi dalam dua jenis, yaitu:⁷

- a. Pengawasan preventif (pengawasan pencegahan) yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, dalam hal ini pengawasan dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu akibat dari suatu tindakan;
- b. Pengawasan represif (pengawasan penanggulangan) yang dilaksanakan setelah kegiatan dilakukan atas timbulnya suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

Apabila pengawasan berjalan dengan baik akan berdampak pada sistem pemerintahan yang baik pula. Dalam hal ini membahas tentang sistem pemerintahan maka perhatian diarahkan pada tiga komponen utamanya yakni peraturan (konstitusi, hukum, etika), lembaga-lembaga (yang berwenang dalam

melaksanakan peraturan tersebut), dan pelaku (khususnya pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan yang melekat pada lembaga-lembaga).⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia, agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁹

Penegakan hukum administrasi berkaitan dengan kepentingan publik, maka prakarsa dalam upaya penegakan hukum administrasi harus muncul dari pemerintah sendiri. Oleh karena itu, dalam intern pemerintahan itu

⁶ Muchson, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 36.

⁷ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Op Cit*, hlm. 458.

⁸ Muhammad Ryan, *Makna Pemerintah Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Widya, Jakarta, 2002, hlm. 32.

⁹ Atika Thahira, Penegakan Hukum Adminitrasi Lingkungan Hidup Ditinjau dari Konsep Negara Hukum, *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Maret, 2020, hlm. 265.

sendiri dibentuk lembaga-lembaga pengawas guna menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Setiap negara ataupun daerah memiliki tujuan bagaimana memberikan keajahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, dalam menggerakkan roda pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang berkesesuaian fungsi dan wewenang masing-masing.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan adalah kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁰
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.¹¹

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 47.

¹¹ Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

3. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk susunan dan/atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, serta digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.¹²
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kota Dumai yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat

¹² Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

¹³ Lihat Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

dan karakteristiknya.¹⁴ Obyek pada penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Seksi Operasi dan Pengendalian.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁵

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer
- 2) Bahan hukum sekunder
- 3) Bahan hukum tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kajian kepustakaan,

6. Analisis Data

Dalam menarik kesimpulan penulis metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif.¹⁶

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Definisi Pengawasan

Pengawasan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan : yang pertama, bahwa

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kedua, bahwa agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden mengenai garis besar tata kerja pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan.¹⁷

1. Tujuan Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sendiri bertujuan untuk :

- a. Menjaga agar penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dapat sesuai dengan rencana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengendalikan agar pengelolaan administrasi dilakukan dengan tertib dan pegawai melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi warga masyarakat yang memerlukan pelayanan.

2. Fungsi Pengawasan

Secara teoritis adapun fungsi-fungsi dari pengawasan, yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*);

¹⁷ Panji Rahmadan, *Op Cit*, hlm. 21.

¹⁸ Novia Tesa, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru", *JOM*, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III, Nomor 2 Oktober 2016, hlm. 4.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 36

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of government performances*);
- e. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*).

Fungsi pengawasan sangat penting dalam setiap organisasi untuk menjamin terselenggaranya tugas serta fungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya.²⁰

3. Macam-macam Pengawasan

Ditinjau dari berbagai aspek, pada dasarnya terdapat berbagai macam pengawasan yang dibedakan dalam bentuk sebagai berikut :²¹

- a. Dari segi subjek pengawasan, jika ditinjau dari segi subjek pengawasan dibedakan dalam dua jenis, yaitu :
 - 1. Pengawasan Internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga pengawasan terhadap organ-organ dalam tubuh suatu organisasi;
 - 2. Pengawasan Eksternal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh perangkat, pejabat, atau

lembaga pengawasan diluar suatu unit organisasi;

B. Tinjauan Umum Tentang Reklame

1. Pengertian Reklame

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku.²² Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame, menyatakan bahwa, reklame adalah benda atau alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.²³

2. Karakteristik Reklame

Ukuran reklame yang digunakan sangat bervariasi, mulai dari ukuran uang kertas yang kecil sampai yang sangat besar seperti yang sering ditemui pada tanah kosong atau papan bulletin yang dipasang dipusat-pusat perbelanjaan. Variasi ukuran hanya merupakan salah satu karakteristik reklame.

3. Berdasarkan Media Penyampaiannya

Menurut Ela Nurelah dan Supriyadi, berdasarkan media penyampainya reklame di bagi

²⁰ Priyo Budiharto, Ending Larasati, Sri Suwitri, "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawasan Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, hlm. 48.

²¹ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 132-134.

²² Muhammad Syukri, analisis potensi penerimaan pajak reklame di Kota Jambi Periode 2014-2016, *Ekonomis: Journal of Economic and Business*, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 82-87.

²³ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

menjadi tiga bagian antara lain sebagai berikut :²⁴

- a. Reklame Audio
Media yang digunakan adalah suara atau kode bunyi-bunyian tertentu, baik dengan alat tertentu atau dengan vocal manusia.
- b. Reklame Visual
Media yang digunakan adalah obyek yang dapat dilihat mata dan gambar, baik gambar diam maupun gambar yang bergerak (film).
- c. Reklame Audio – Visual
Menggunakan media gabungan dari audio dan visual.²⁵

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

Secara geografis, kota Dumai berada di pesisir pantai pulau Sumatera sebelah timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.²⁶

²⁴

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101104254-569-867901/mengenal-jenis-jenis-reklame-pengertian-dan-contohnya>, diakses pada 7 Mei 2023 pukul 10.27 WIB.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <https://www.riau.go.id/home/content/5/kota-dumai-:~:text=Kota%20Dumai%20berada%20di%20pesisir,%22.23%C2%B4%20lintan>

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu dikenal dengan sebutan *Bailluw* adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon, namun demikian tidak sampai satu bulan berdasarkan perintah jawatan praja daerah istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.²⁷

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksud

²⁷ [g%20utara](https://satpolpp.bantenprov.go.id/id/read/sejarah-singkat.html), diakses pada 8 Mei 2023 pukul 13.35 WIB.

²⁷

<https://satpolpp.bantenprov.go.id/id/read/sejarah-singkat.html>, diakses pada 12 Mei 2023 pukul 11.20 WIB.

untuk menimbulkan akibat hukum, yang mencakup timbul lenyapnya akibat hukum tertentu). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²⁸

Dalam penyelenggaraan reklame, reklame memiliki standar dalam penyelenggaraannya yang dijelaskan pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021. Dengan hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, mengenai nama, objek, dan subjek pajak. Dan dapat dilaksanakan jika telah memenuhi kewajibannya yaitu, tertera pada Pasal 8 ayat (1), “setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Dumai yang dilakukan oleh pemilik/penyelenggara atau kuasanya wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk”.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adlin Persada, S.A.P, mengatakan bahwa dikarenakan Standar Operasional Prosedur pengendalian, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan reklame masih dalam tahap pengajuan dan dokumen resminya belum ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menertibkan reklame dengan cara penyelenggaraan reklame yang melanggar aturan seperti reklame yang telah habis masa berlakunya, reklame tanpa atau tidak berizin, serta reklame yang didirikan pada tempat-tempat yang tidak diperbolehnya seperti misalnya pada jalur hijau. Hasil penertiban reklame yang pihak Satpol

PP dapatkan dilapangan itu akan mereka simpan terlebih dahulu selama kurun waktu 2 minggu sampai 1 bulan, jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada pihak yang membongkar atau mengambil reklame tersebut, maka akan ditertibkan oleh pihak Satpol PP.³⁰

Jadi dalam hal ini ada sedikit kekurangan dengan Peraturan Daerah kota Dumai nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame, yaitu belum terdapatnya peraturan lanjutan mengenai tata cara pengendalian, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan reklame. Dan dalam hal pengimplementasian peraturan tersebut juga yang belum maksimal.

B. Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Pengawasan merupakan aktivitas atau prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan digunakan *as tool for controlling in administration*, dimana suatu sistem dikumpulkan dan digunakannya informasi untuk mengevaluasi kinerja tiap sumber daya yang ada dalam suatu organisasi seperti manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan organisasi guna mencapai operasional yang lebih efisien. Ada 4 aspek pengawasan yang dijadikan sebagai pengukuran dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu sebagai berikut :³¹

1. Menetapkan Standar

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.102.

²⁹ Pasal 2 dan 8 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

³⁰ Wawancara dengan Bapak Adlin, Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja, hari senin tanggal 9 Juli 2023, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

³¹ *Ibid.*

Menentukan standar ukuran disini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dicapai. Hasil ini dapat dilihat dari standar pokok dan fungsi pengawasan yang ada dan juga bagaimana standar atau pedoman yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Dumai. Penetapan standar dapat berupa penetapan fisik yang berisikan kemampuan aparat pengawas penyelenggara reklame memiliki kemampuan teknis dan manajerial.

2. Pengukuran

Mengukur pelaksanaan kinerja dilakukan agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid.³²

3. Membandingkan

Merupakan suatu proses yang menunjukkan Satpol PP sebagai pihak pengawasan penyelenggaraan reklame dilapangan, melakukan perbandingan hasil pengawasan dengan standar yang telah ditetapkan dan melakukan analisa melalui tahapan dokumentasi terlebih dahulu pada reklame yang diindikasikan melanggar kepada tim reklame lainnya sebelum dilakukan tindakan koreksi berupa penertiban, dilakukan sebuah verifikasi lebih lanjut dan berdasarkan persetujuan dan pertimbangan.

4. Melakukan Tindakan

Merupakan bentuk kegiatan dalam menanggapi

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara reklame sehingga perlu dilakukan beberapa hal seperti menganalisis penyimpangan yang terjadi sebelumnya untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan, lalu mengambil tindakan koreksi sesuai dengan prosedur penertiban reklame atau SOP yang berlaku.

Seharusnya pengawasan dan penertiban yang diperintahkan pemerintah kepada dinas yang terkait disampaikan secara tegas dan pelaksanaan penertiban pun dilaksanakan secara cepat sehingga keberadaan reklame di Kota Dumai dapat terkendali dan tidak menyalahi aturan. Ketidakjelasan pengaturan penyelenggaraan reklame dalam hal pengawasan dan penertiban mengakibatkan ketidakefektifan dalam melaksanakan salah tujuan Peraturan Daerah Kota Dumai yakni agar selaras dengan estetika kota dan kenyamanan masyarakat. Sehingga banyak reklame yang tersebar di Kota Dumai tetapi menyalahi aturan yang ada terutama dalam hal perizinan dan perletakkannya.³³

C. Faktor Penghambat dan Pendukung bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Dumai

Dari hasil wawancara kepada responden mengenai faktor penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakan hukum yakni melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame di kota Dumai, dengan hasil berikut ini :

1. Kurangnya tenaga operasional

³² *Ibid.*

³³ Ariq Alauddin dan Abdul Rohman, *Op Cit*, hlm. 978.

Kekurangan tenaga operasional adalah salah satu kendala dari kurangnya pengawasan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja yang diwakilkan oleh Bapak Adlin Persada, S. A. P selaku ahli pertama Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatakan bahwasanya pengawasan yang dilakukan belum maksimal dikarenakan kurangnya jumlah personil aparat Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan lainnya, jumlah personil satuan polisi pamong praja kota dumai terdiri dari 108 orang PNS dan 148 orang TKPK, yang terbagi atas masing-masing bidang. Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang hanya terdiri dari 26 orang PNS dan 40 orang TKPK, karena tingginya volume yang harus dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terhadap luasnya wilayah dan kondisi Kecamatan-kecamatan yang memiliki jarak tempuh yang relatif jauh membutuhkan personil yang memadai. Keadaan personil Satuan Polisi Pamong Praja saat ini jauh dari kondisi yang diharapkan apabila dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena terselenggaranya reklame di Kota Dumai.³⁴

2. Minimnya Koordinasi Antar Penegak hukum

³⁴ Wawancara dengan Bapak Adlin, Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja, hari senin tanggal 6 Juni 2023, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Baik pihak DPM-PTSP maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai harus sama-sama aktif untuk menegakkan hukum yang berlaku. Penegakkan hukum akan semakin maksimal jika komunikasi dan antar kedua penegak hukum berjalan dengan baik. Contohnya adalah dengan berbagi informasi mengenai posisi reklame-reklame berizin dan tidak berizin sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Dumai bisa langsung menuju lokasi. Informasi mengenai persebaran lokasi reklame juga akan mempermudah Satpol PP dalam melakukan pengawasan.

3. Kurangnya Sarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP mengatakan bahwa sarana yang mereka miliki terbatas untuk bisa mengawasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan reklame di kota Dumai. Keterbatasan tersebut berupa kurangnya peralatan dalam menjalankan penertiban, seperti kendaraan operasional dan perlengkapan seperti tangga dan alat-alat lainnya.³⁵ Kondisi ini diperkuat dengan adanya reklame yang melanggar yang belum ditindak. Operasi pengawasan yang tidak efektif dan hanya dilakukan di jalan-jalan utama kota Dumai. Padahal potensi pelanggaran juga bisa terjadi di jalan-jalan desa. Teknis operasi yang dilakukan dengan hanya memperhatikan wilayah tertentu juga dipandang lambat untuk dapat menegakkan hukum pelanggaran penyelenggaraan reklame. Berikut adalah data kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

4. Kurang Jelasnya Peraturan

Peraturan-peraturan yang menjadi payung hukum segala

³⁵ *Ibid.*

bentuk pengawasan dan penegakkan peraturan daerah merupakan tugas utama Satpol PP kita Dumai, mengingat tingginya pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang muncul di kota Dumai dibutuhkan peraturan pendukung yang dapat menjadi payung hukum bagi personil aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam melaksanakan Tupoksinya, sehingga penerapan peraturan dapat terkalahkan dengan maksimal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap penyelenggaraan reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame masih memiliki kekurangan, serta dalam mengimplementasikannya juga belum maksimal. Dalam pengaturan nya mekanisme pemasangan reklame harus memenuhi syarat estetika, norma, sosial budaya, ketertiban dan keamanan, keselamatan, kemanfaatan, etika, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan atas beberapa indikator dalam penelitian belum terpenuhi dengan maksimal. Seperti belum terdapatnya peraturan yang lebih jelas mengenai pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame itu sendiri. Selanjutnya Satpol PP menertibkan hanya berdasarkan hasil

temuan ketika patroli di lapangan saja, selain itu juga kurangnya kerjasama antar instansi terkait yang ikut dalam penertiban reklame tersebut.

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah kurangnya tenaga operasional, minimnya koordinasi antar penegak hukum, kurangnya sarana, dan minimnya peraturan yang menjadi payung hukum dalam segala bentuk pengawasan penyelenggaraan reklame.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan pula beberapa saran berikut ini, yaitu :

1. Untuk Pemerintah Kota Dumai terutama Walikota untuk segera menyelesaikan dokumen mengenai Peraturan tentang tata cara pengendalian, pengawasan, dan penertiban penyelenggara reklame;
2. Anggaran dan dana merupakan hal yang penting untuk menunjang pelaksanaan pengawasan keberadaan papan reklame setiap operasional yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
3. Untuk lebih ditingkatkannya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas terkait terhadap papan reklame di Kota Dumai baik dalam segi waktu yang lebih intensif, serta lebih peka terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan operasional dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amiq, Bachrul, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan*

- Keuangan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Effendi, A'an, dan Poernomo, Freddy, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Pers, Pekanbaru.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Bandung.
- Juhir, Jusuf, dan Situmorang, M, Viktor, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2013, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Muchson, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan Dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Oktaria, S.H., M.Si., Zulkarnain, H. Iskandar dan Mahdi, S.H., M.H., Dr. Imam, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Poernomo, Freddy dan Effendi, A'an, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pujirahayu, Wirassih, Prof. Dr. Esmi, 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ridwan, Juniarso, dan Sodik Achmat, 2010, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung.
- Ryan, Muhammad, 2002, *Makna Pemerintah Ditinjau Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Mulya, Jakarta .
- S, Roestam dan Kodoatie, J, Robert, 2010, *Tata Ruang Pengelolaan Bencana Infrastruktur, Ruang Wilayah, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta.
- Sidharta, B. Arief, 1996, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Ahmad Calam dan Amnah Qurniati, 2016, "Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan", *Jurnal Saintikom*, Vol. 15, No. 1 Januari.
- Angi Risky Pandiangan, 2014, "Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Papan Reklame Di Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 1, No. 1, Februari.
- Ariq Alauddin dan Abdul Rohman, 2022, Implementasi Penertiban Reklame Yang Tidak Berizin Di Kota Bandung, *Jurnal*

LawStudies, Volume 2, Nomor 2.

Atika Thahira, 2020, Penegakan Hukum Adminitrasi Lingkungan Hidup Ditinjau dari Konsep Negara Hukum, *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Maret.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Serly Rahmadayandi dan Rispa Eliza, 2021, “Proedur Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, Vol. 1, No. 1, Februari.

Siti Hartinah, 2023, “pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru dalam peredaran dan penjualan minuman beralkohol berdasarkan peraturan menteri perdagangan republic indonesia nomor 20/m-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol”, *JOM*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Volume X, No. 2, Juli-Desember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

D. Website

<https://kontrastimes.com/satpol-pp-tetap-lakukan-rutin-razia-pencabutan-baliho-bener-tanpa-izin-di-kota-dumai/>

<https://satpolpp.dumaikota.go.id/berita-detail/11251.9/satpol-pp-dumai-lakukan-koordinasi-ke-dpmpstp-terkait-penyelenggaraan-reklame-di-kota-dumai>

<http://www.reklameindonesia.com>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai,

<https://www.riau.go.id/home/content/5/kota-dumai-~:text=Kota%20Dumai%20berada%20di%20pesisir,%22.23%C2%B4%20lintang%20utara>,

<https://web.dumaikota.go.id/visi-misi>

<https://satpolpp.bantenprov.go.id/id/read/sejarah-singkat.html>

<https://satpolpp.dumaikota.go.id/profil/vismis>